

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Operasional

##### 2.1.1 Pengertian Wilayah

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, pengertian wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 18).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya). Menurut Glasson dalam Tarigan 2005, membagi dua cara pandang tentang wilayah, yaitu

- a. Secara subyektif, wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi satu dari lokasi lainnya.
- b. Secara obyektif, wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala di setiap wilayah. Menggunakan pandangan obyektif membuat jenis analisis atas ruang wilayah menjadi terbatas.

Menurut Mulyono Sadyohutomo 2008, dalam arti fisik keruangan, wilayah dan daerah mempunyai pengertian yang sama sebagai terjemahan dari *region* yaitu suatu hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi (*sites*) atau areal-areal (*areas*), baik mencakup ciri perkotaan maupun perdesaan. Pengertian wilayah disini digunakan untuk dua keadaan berbeda yaitu pertama untuk menyatakan adanya kondisi geografis yang homogen dan kedua untuk menyatakan adanya kelompok fungsional. Dalam arti administrasi, antara wilayah dengan daerah digunakan secara berbeda yaitu wilayah sering dimaksudkan untuk menunjukkan lingkup teritorial administrasi pemerintahan pusat.

Pengertian wilayah (Isard 1975 dalam Ernan dkk, 2009) yaitu suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki *interest* di didalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi. Menurut Ernan dkk, 2009 sendiri pengertian istilah wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Dalam definisi diatas Ernan dkk menyimpulkan konsep wilayah terdiri dari tiga wilayah homogen (*uniform*), wilayah sistem/fungsional dan wilayah perencanaan dan pengelolaan (*planning region* atau *programming region*).

Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Menurut Sumarmi, 2007 bahwa suatu wilayah merupakan bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempunyai sifat dan khas tertentu sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan khusus anatar kompleks lahan, air, udara, tanaman, binatang dan manusia sendiri. Selain itu dalam konsep wilayah maka diartikan daerah tertentu yang didalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi anantara faktor lingkungan dan demografis.

### **2.1.2 Pengertian Kesenjangan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'kesenjangan' diartikan sebagai perbedaan, ketidaksinambungan, ketidaksimetrisan dan adanya jurang pemisah. Kesenjangan di sini merupakan sinonim dari atau memiliki pengertian yang sama dengan kata 'ketimpangan', 'ketidakmerataan', dan 'disparitas'.

Menurut (Lay (1993:53) dalam Rina 2007) indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana. Jadi berdasarkan pernyataan Lay diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketidakmerataan itu terbagi atas fisik seperti ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian. Indikator yang kedua adalah ekonomi yaitu kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan. Ketiga yaitu sosial jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan. Williamson menyatakan bahwa disparitas antarwilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan.

Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal (*Endowment Factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, Sadono, 1976).

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah (Arsyad, Lincoln, 1999:129).

## 2.2 Konsep Perwilayahan

Tarigan (2005:102) mendefenisikan wilayah sebagai satu kesatuan ruang secara geografi yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Keragaman dalam mendefenisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah.

Menurut Rustiadi et all. (2009), ada enam jenis konsep wilayah antara lain:

- a. Konsep-konsep wilayah klasik, yang mendefinikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik dimana setiap komponen-komponen dari wilayah tersebut satu sama lain saling fungsional
- b. Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. Dengan demikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam penentuan sektor perekonomian wilayah sesuai dengan potensi atau daya dukung utama yang ada dan perkembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah.
- c. Wilayah nodal, menekankan perbedaan dua komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu sel hidup yang mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayan dan permukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*hinterland*).
- d. Wilayah sebagai sistem dilandasi atas pemikiran bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan.
- e. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapat sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral
- f. Wilayah administratif politis berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Perkembangan suatu wilayah secara alami ditentukan oleh karakter dari sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah relatif akan lebih maju dibanding dengan wilayah yang miskin sumberdaya, khususnya pada awal perkembangannya.

Lebih lanjut Rustiadi *et all* (2009) menambahkan bahwa dalam perkembangan wilayah menjadi indikator penting adalah tingkat interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Wilayah-wilayah yang lebih berkembang pada dasarnya mempunyai tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang belum berkembang. Interaksi itu sendiri terjadi karena adanya faktor yang cukup penting dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan akses yang lebih baik akan menyebabkan tingkat interaksi yang tinggi dengan wilayah lain sehingga menjadi lebih cepat berkembang. Faktor lain yang mendorong perkembangan wilayah adalah lokasinya berdekatan dengan pusat ekonomi atau pemerintahan. Lokasi yang dekat dengan pusat ekonomi atau pemerintahan umumnya akan lebih terpacu perkembangannya dibanding wilayah wilayah yang relatif lebih jauh dan bisa jadi nantinya akan berkembang sebagai penyangga bagi wilayah pusat tersebut.

### 2.3 Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang merata dan tingkat pengangguran yang rendah merupakan tolak ukur utama bagi kemajuan pembangunan suatu wilayah. Sasaran utama yang banyak dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengembangkan wilayahnya adalah meningkatkan pertumbuhan produktivitas (*productivity growth*), pemeratakan distribusi pendapatan (*income distribution*), memperluas kesempatan berusaha atau menekan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), serta menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (*sustainable development*). Pengembangan wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*).

Beberapa konsep pengembangan wilayah adalah sebagai berikut (Mangiri dan Widiati, dalam Alkadri, dkk., 2001:8-13):

#### 1. Pengembangan Wilayah berbasis Sumberdaya

Kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan yang lainnya. Maka, konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:

- a. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia
  - b. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam
  - c. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya modal dan manajemen
  - d. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam
  - e. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis)
2. Pengembangan wilayah berbasis Komoditas Unggulan

Konsep ini menekankan motor penggerak pembangunan suatu wilayah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional.

3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi (*Free Market Mechanism*)

Konsep ini menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan bidang-bidang lainnya. Pembangunan ekonomi tersebut dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar pada persaingan sempurna.

4. Pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan

Strategi pengembangan wilayah dapat pula ditempuh dengan mengedepankan peranan setiap pelaku pembangunan ekonomi. *United Nations* (1996) memilah pelaku pembangunan ekonomi menjadi lima kelompok:

- a. Usaha kecil/rumah tangga (*household*)
- b. Usaha lembaga sosial (*nonprofit institutions*)
- c. Lembaga bukan keuangan (*nonfinancial institution*)
- d. Lembaga keuangan (*financial institution*)
- e. Pemerintah (*government*)

## 2.4 Teori Perwilayahan

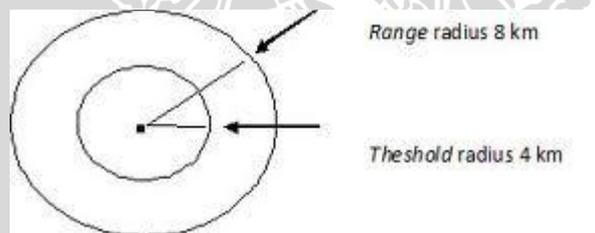
### 2.4.1 Teori Tempat Pusat

Walter Christaller pada tahun 1933 menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul *Central Places In Southern Germany* (diterjemahkan oleh C.W. Baski pada tahun 1966 dalam Rahardjo 2008). Dalam buku ini Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri dimana angka 3 yang diterapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat berarti. Itulah sebabnya disebut sistem  $K=3$  dari

Christaller. Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri berikut:

1. Wilayahnya adalah daratan tanpa roman, semua adalah datar dan sama.
2. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (*isotropic surface*).
3. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh.
4. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak/biaya.

Luas pemasaran minimal sangat tergantung pada tingkat kepadatan penduduk pada wilayah asumsi. Makin tinggi kepadatan penduduk makin kecil wilayah pemasaran minimal, begitu sebaliknya. Dalam hal ini misalnya wilayah pemasaran minimal itu adalah dengan radius 4 km. Wilayah pemasaran minimal disebut *threshold*. Tidak boleh ada produsen untuk komoditas yang sama dalam ruang *threshold*. Apabila ada, salah satu akan gulung tikar atau kedua-duanya akan gulung tikar dan kemudian muncul pengusaha baru.



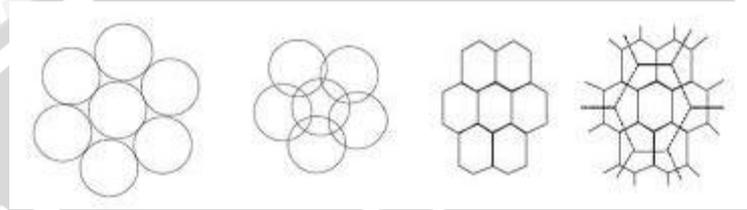
**Gambar 2.1** Luas jangkauan *range* dan *threshold*

(sumber <http://indrajayaadriand.files.wordpress.com/2009/01/luas-jangkauan-range-dan-threshold.jpg&imgrefurl>)

Model Christaller tentang terjadinya model area perdagangan heksagonal sebagai berikut:

1. Mula-mula terbentuk areal perdagangan satu komoditas berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan *threshold* dari komoditas tersebut.
2. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa *range* dari komoditas tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih.
3. Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh daratan yang tidak lagi tumpang tindih.

4. Tiap barang berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan  $k=3$ , barang orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal barang orde II. Barang orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal barang orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang-tindih.



**Gambar 2.2 Kronologi terjadinya area perdagangan heksagonal**

(sumber <http://indrajayaadriand.files.wordpress.com/2009/01/kronologi-terjadinya-area-perdagangan-hexagonal.jpg&imgrefurl>)

Berdasarkan model  $k=3$ , pusat dari hierarki yang lebih rendah berada pada sudut dari hierarki yang lebih tinggi sehingga pusat yang lebih rendah berada pada pengaruh dari tiga hierarki yang lebih tinggi darinya.

- **Terjadinya Konsentrasi Produsen/Pedagang dari berbagai jenis barang.**

Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota.

- **Terjadinya Konsentrasi Produsen/Pedagang dari barang sejenis**

Uraian tentang range dan threshold dapat menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada satu lokasi tetapi konsep itu tidak dapat menjelaskan mengapa dipasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditas sejenis juga memilih untuk berlokasi secara berkonsentrasi/berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan produsen/pedagang sejenis berada berdekatan karena pada satu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen/pedagang.

Apabila berdekatan harus ada yang gulung tikar dan yang tersisa hanya satu produsen/pedagang. Jadi kemungkinan penjesalannya adalah hanya mungkin lewat penelaahan sikap manusia. Adalah menjadi sifat manusia untuk berusaha mendapatkan barang yang diinginkan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang semurah mungkin. Apabila pembeli hanya berhadapan dengan seorang penjual, harga yang ditawarkan penjual menjadi tidak jelas bagi pembeli, apakah harga itu adalah harga terendah yang dapat dia peroleh atau tidak.

Dengan berkumpulnya banyak penjual barang sejenis pada lokasi yang sama, pembeli mendapat kesempatan untuk membandingkan harga di antara para penjual dan akan membeli pada penjual yang menawarkan harga terendah (pembeli butuh informasi untuk membuat keputusan). Hal ini membuat lokasi yang memiliki banyak penjual barang sejenis, lebih memiliki daya tarik bagi pembeli ketimbang lokasi yang hanya memiliki sedikit penjual.

## **2.5 Teori Kutub Pertumbuhan**

Pertama kali Francois Perroux orang perancis yang memberikan masukan ide yang mengena tentang teori pusat pertumbuhan. Dasar Perroux untuk memberikan pernyataannya yaitu berawal dari teori Schumpeter dimana dia mengungkapkan “inovasi dalam kewiraswastaan akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah. Teori Shcumpeter jelas memberikan gambaran dari pertumbuhan wilayah yang dimulai dari pusat dengan inovasi kewiraswastaan tinggi dan memberikan dampak pada daerah belakang pusat atau daerah pinggiran.

Kembali pada teori Francois Perroux tentang Pusat Pertumbuhan dimana teori dengan mengakomodir gabungan dari Konsentrasi/ Sentralisasi atau terpusat dan Desentraliasi. Sentralisasi berarti adanya pusat di tengah dengan pusat kegiatan yang terus berkembang tumbuh sehingga memberikan suatu proses dari hasil-hasil masukan produk daerah sub pusat. Sedangkan desentralisasi adalah konsep pertumbuhan wilayah yang mengedepankan daerah agar ikut berkembang seperti strategi tahun 1999 yakni otonomi daerah. Teori Francois Perroux sangat relevan pada penggunaan strategi kebijaksanaan pembangunan wilayah yang sering di aplikasi pada industri-industri daerah. Penempatan lokasi industri sangat memerlukan perencanaan strategis dimana lokasi optimal ditentukan oleh bahan

baku, pekerja dan wilayah pemasaran terkait hukum segitiga Weber. Lokasi optimal industri dengan mempertimbangkan 3 syarat pokok diatas dapat memberikan hasil yang memuaskan dan memberikan pertumbuhan wilayah daerah yang positif.

Pembangunan dan pertumbuhan tidak dapat terjadi pada semua wilayah tata ruang namun tergantung pada tempat-tempat tertentu dengan memiliki karakteristik syarat-syarat/ variabel pendukung pembangunan. Aglomerasi ekonomi merupakan salah satu cara meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah sehingga faktor biaya dalam jarak dapat dikurangi (dalam kasus ini adanya industri bahan baku/ bahan setengah jadi → barang jadi, bersanding dengan industri mentah/ barang mentah → barang setengah jadi). Aglomerasi berhubungan erat dengan teori Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Poles Theory*) dimana industri melakukan inovasi pertumbuhan ekspansi dan berlokasi di daerah perkotaan, sangat mendorong berkembang dan tumbuhnya kegiatan industri lain keseluruhan daerah dalam lingkup yang luas.

Teori aglomerasi pada jaman dahulu hanya memikirkan penghematan dari lokasi dan penghematan urbanisasi. Namun sekarang prinsip penghematan bukanlah prinsip pokok dari aglomerasi. Sekarang prinsip eksternalitas muncul sebagai landasan baru untuk aglomerasi dan terdiri dari 4 eksternalitas yakni :

Penghematan ekonomi aglomerasi eksternal. Penghematan ini ditinjau dari menurunnya biaya karena terjadi kegiatan diluar industri atau perusahaan karna melakukan aglomerasi.- penghematan biaya, adanya kumpulan indutri akan berdampak pada pencarian pasar. Dengan jumlah pasar yang satu dan industri yang banyak maka terjadi persaingan sehingga industri-indutri berkembang mencari pasar dan berinovasi agar dapat memasarkan hasil produksinya. - penghematan tenaga kerja terampil, penghematan ini dilakukan karena industri menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil dan tidak asal padat karya yang hanya mengeruk pekerja tanpa melihat *skill* kemampuan. Jadi industri lebih cepat berkembang dengan tenaga terampil dan skill memadai. -penghematan bahan baku. Adanya aglomerasi beberapa industri dengan jenis industri yang saling terkait hasil produksinya (kasus industri X menghasilkan produk b dan industri Y mengolah lagi produk b menjadi c). Keterkaitan ini menghasilkan komunikasi

antar industri sehingga bahan baku dapat diolah sesuai permintaan industri yang membutuhkan. Dan apabila ada beberapa industri yang sama berada dalam satu lokasi dengan jenis satu bahan baku akan memberikan gambaran satu sumber bahan baku. Bahan baku akan diminta oleh industri tersebut. Jadi sumber bahan baku hanya perlu ke aglomerasi area industri tersebut (satu tujuan).

a) Penghematan aglomerasi ekonomi secara internal

Penghematan aglomerasi internal dapat terlihat dari menurunnya biaya-biaya yang berasal dari dalam industri karena terjadi peningkatan efisiensi produksi dari aglomerasi. Contoh dari efisiensi yakni terjadinya pembagian job description sesuai keahlian atau spesialisasi. Dengan spesialisasi kerja dalam industri akan meningkatkan profesionalitas kerja serta efektifitas waktu. Selain itu mekanisasi dilakukan dengan mengubah dari pekerja menjadi mesin yang bergerak dalam sebagian besar pekerjaan. Hasil kontinuitas akan menunjukkan stabilitas produksi sehingga biaya untuk pekerja dapat dikurangi. Dengan Aglomerasi kerjasama sub kontrak dapat terjalin dan terkontrol secara kesinambungan serta stabilitas titik optimum produksi dapat terjadi.

b) Skala Ekonomi

Skala perusahaan dan industri yang meningkat akan berimplikasi atau berbanding lurus dengan penghematan skala produksi sehingga peningkatan keuntungan industri tersebut. Skala pabrik yang membesar juga akan membuat skala produksi besar sehingga hasil juga meningkat.

c) Cakupan ekonomi

Semua instrumen atau alat atau unit produksi jika bekerja secara bersama dan komprehensif maka penghematan biaya dapat dilakukan secara signifikan dan berbanding lurus pula pada keuntungan produksi.

Teori Franciss Perroux tentang kutub pertumbuhan membagi dua konsep yaitu secara fungsional dan geografis. Fungsional disini dimaksudkan pada unsur kedinamisan pada suatu industri maupun suatu usaha dapat membangkitkan ekonomi atau menumbuhkan ekonomi wilayah tersebut maupun wilayah luar atau daerah. Sedangkan konsep geografis diartikan pada kelengkapan dan kemudahan dari utilitas atau fasilitas suatu wilayah yang mendorong kegiatan-kegiatan pada wilayah tersebut. Seperti pepatah ada “gula ada semut”, kelengkapan fasilitas

akan menarik wilayah luar untuk masuk ke wilayah tersebut, seperti ada semacam magnet sehingga berbagai usaha masuk dan menjadi bagian wilayah tersebut. Masyarakat akan ikut menikmati dari kelengkapan utilitas wilayah tersebut dan kegiatan ekonomi menjadi terarah dan maju.

Teori pusat pertumbuhan memerlukan bantuan dari mekanisme pasar yang terus berkembang seiring globalisasi. Mekanisme pasar yang terkadang membantu membuat suatu industri dapat berjaya terkadang pasar menjadi dikuasi oleh beberapa pihak seperti monopoli negatif oleh beberapa orang. Monopoli negatif sangat merugikan industri kecil dan menengah karena liberalisme industri besar menguasai pasar dengan harga rendah. Industri besar mampu menyuplai produk dengan harga lebih murah dalam jumlah besar namun sebaliknya bagi industri kecil. Keseimbangan wilayah ikut terganggu karena hubungan internal dari industri di pusat pertumbuhan dan di daerah sudah tidak seimbang. Pusat cenderung menguasai dan mencekik daerah seperti membeli bahan baku murah dan memberikan masukan pada pemerintah daerah sedikit maka keseimbangan sulit tercapai. Adanya campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengontrol perekonomian wilayah sangatlah diperlukan sehingga praktek monopoli negatif dapat mengatasi matinya industri lemah dan membuat hubungan industri unggulan dan lemah saling interaksi begitu pula pusat pertumbuhan. Dengan demikian pusat pertumbuhan dapat menjadi penyeimbang pembangunan wilayah karena dukungan dari semua yang terlibat pada kegiatan wilayah tersebut.

### **2.5.1 Kesenjangan sebagai Bagian Dari Pengembangan Wilayah**

Perekonomian dapat berkembang apabila semua sektor berkembang secara serempak dan selarasa merupakan teori perkembangan wilayah secara seimbang. Teori ini didukung oleh para pakar seperti Rosentein-Rodan, Lewis, Scitovsky serta Nurske. Mereka mengatakan bahwa suatu wilayah atau wilayah terbelakang dapat berkembang jika seluruh sektor harus melangkah bersama agar sektor tersebut dengan mudah mendapatkan masukan atau input yang diperlukan (Siti Surtiah, 2002:89). Namun ada paham lain yang muncul seperti Hirschman yang menyatakan bahwa perkembangan seharusnya tidaklah seimbang. Perkembangan terjadi karena ada sektor yang berkembang lebih pesat dari sektor lainnya. Perkembangan wilayah menjadi suatu keadaan ketidakseimbangan yang berantai

dimana terdapat sektor yang paling unggul dan memimpin sehingga menjalankan perkembangan ke sektor lainnya seperti berantai terkait. (Hirschman, 1968 dalam Siti, 2002).

Ketidakseimbangan perkembangan wilayah disebabkan banyak hal seperti *polarization effect*/ efek pengkutuban. Efek pengkutuban terjadi dimana terdapat wilayah utara dan selatan dalam suatu negara. Wilayah utara berkembang cepat dan maju dengan dukungan sektor industri. Sedangkan wilayah selatan berkembang secara stagnan dengan sektor pertanian. Aliran modal sumber daya alam menjadi mengalir ke utara. Kondisi kesenjangan utara dan selatan seperti ini memberikan pengaruh merugikan pada salah satu pihak yaitu wilayah selatan sehingga efek ini disebut efek pengkutuban. Namun tidak selamanya wilayah selatan terus mengalami kondisi tidak menguntungkan, dampak perkembangan yang maju pada wilayah utara akan memberikan perpindahan perkembangan ke wilayah selatan seperti perpindahan industri mendekati pertanian. Efek ini disebut efek penetes/ *trickling down effect*.

Pendapat lain mengenai kesenjangan yaitu Myrdal yaitu adanya efek yang memperbesar kesenjangan karena potensi selatan terserap ke utara yang disebut *backwash effect*. Lawan dari perkembangan *backwash effect* yaitu *spread effect* yaitu kondisi memperkecil kesenjangan yang diakibatkan wilayah utara menyebarkan potensinya ke wilayah selatan sehingga wilayah selatan ikut berkembang.

## 2.6 Variabel dan Faktor Penyebab Kesenjangan Wilayah

Faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antarwilayah tersebut yaitu (Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1975:166) dalam Rina, 2007) :

1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian (terdidik) dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya), dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian relatif

kecil pada umumnya. Disamping itu, terjadi pula pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang telah berkembang.

3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi di daerah yang telah berkembang – karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru telah mendorong perkembangan industri yang lebih pesat di daerah yang lebih maju.
4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang. Industri di daerah yang kaya telah menjadi sumber dari barang-barang yang diperdagangkan, dan demikian industri yang dikembangkan di daerah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh pasarnya.
5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (*regional market*) telah menyebabkan terjadinya rintangan untuk pemencaran dan pelipatgandaan pendapatan.

Disparitas (kesenjangan) pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam beberapa variabel : pendapatan perkapita; kualitas sumber daya manusia; ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi; pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan; akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah banyak disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam dan distorsi sistem perkotaan dan perdesaan. (Daryanto. 2003)

Menurut Anwar (2005) dalam Rina, 2007, Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketimpangan (disparitas), diantaranya adalah :

- Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya alam
- Perbedaan demografi
- Perbedaan kemampuan sumber daya manusia
- Perbedaan potensi lokasi
- Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan
- Perbedaan dari aspek potensi pasar

Sedangkan menurut Anwar (2005) wilayah memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Wilayah maju adalah wilayah yang telah berkembang yang biasanya dicirikan dengan pusat pertumbuhan. Di wilayah ini biasanya ada pemusatan penduduk, industri, pemerintahan dan sekaligus pasar yang potensial. Selain itu juga dicirikan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang juga tinggi. Potensi lokasi yang strategis, sarana pendidikan yang lengkap, dan aksesibilitas yang baik terhadap pasar domestik dan pasar internasional.
- b. Wilayah yang sedang berkembang biasanya dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat dan biasanya merupakan wilayah penyangga dari wilayah maju. Potensi SDA yang cukup tinggi, tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, namun belum terjadi kesesakan dan tekanan biaya sosial. Masih terjadi keseimbangan antara sektor pertanian atau primer lainnya dengan sektor industri. Sektor jasa sudah mulai berkembang, meski perannya masih relatif kecil.
- c. Wilayah yang belum berkembang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan yang masih rendah baik secara absolut, maupun secara relatif, namun memiliki potensi SDA yang belum dikelola atau dimanfaatkan. Wilayah ini didiami oleh kepadatan penduduk yang masih rendah dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang masih rendah juga. Wilayah ini belum memiliki aksesibilitas yang baik terhadap wilayah lainnya. Sektor ekonomi wilayah ini masih didominasi oleh sektor primer dan biasanya belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri.
- d. Wilayah yang tidak berkembang dicirikan oleh dua hal yaitu : (1) Wilayah tersebut memang tidak memiliki potensi baik potensi sumber daya alam atau lokasi sehingga secara alamiah sulit sekali berkembang dan mengalami pertumbuhan; dan (2) Wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi, baik sumber daya alam atau lokasi maupun memiliki keduanya, tetapi tidak dapat berkembang dan bertumbuh karena tidak memiliki kesempatan dan cenderung dieksploitasi oleh wilayah yang lebih maju. Tingkat kepadatan penduduk yang jarang, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, tidak memiliki infrastruktur

yang lengkap, dan tingkat aksesibilitas yang rendah. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, namun tidak berkembang dicirikan oleh tingkat kebocoran wilayah yang tinggi, dimana manfaat tertinggi dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut dinikmati oleh wilayah lainnya.

Beberapa Faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagaimana yang dikemukakan oleh Murty (2000) dalam Daryanto, 2003, diantaranya adalah :

- Faktor geografis, suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, dan sumber daya mineral dan variasi spasial lainnya.
- Faktor historis, perkembangan masyarakat dan bentuk kelembagaan atau budaya serta kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja.
- Faktor politis, tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi disuatu wilayah tidak akan berkembang.
- Faktor kebijakan, terjadinya kesenjangan antar wilayah biasa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang sentralistik hampir disemua *sector*, dan lebih menekankan pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pembangunan diwilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa anatar daerah.
- Faktor *administrative*, kesenjangan wilayah dapat terjadi karena kemampuan pengelolaan *administrative*. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang lebih baik cenderung lebih maju.
- Faktor *social*, masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitive, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai *social* yang cenderung konservatif dan menghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang *relative* maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang.

- Faktor ekonomi, Faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah yaitu:
  - Perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti : lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan.
  - Terkait akumulasi dari berbagai faktor. Salah satu lingkaran kemiskinan, konsumsi rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan kemudian kondisi masyarakat yang tertinggal, standar hidup rendah, efisiensi rendah dan jumlah pengangguran meningkat namun diwilayah yang maju, standar hidup tinggi, pendapatan semakin tinggi, tabungan semakin banyak yang pada akhirnya masyarakat semakin maju.
  - Kekuatan pasar bebas telah mengakibatkan faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, modal perusahaan dan aktifitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan dan asuransi yang dalam ekonomi maju memberikan hasil yang lebih besar, cenderung terkonsentrasi diwilayah maju.
  - Terkait dengan distorsi pasar, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja dan sebagainya.

Di Indonesia faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi atau wilayah, menurut Tambunan (2003), diantaranya adalah:

- Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas pembangunan antar daerah. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

- Alokasi investasi

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersementer dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kurangnya investasi langsung di suatu wilayah membuat

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

- Tingkat mobolitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti upah/gaji dan tingkat suku bunga atau tingkat pengambilan dari investasi langsung antar provinsi juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan anatar provinsi dapat dijelaskan dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita provinsi, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar bersifat bebas, mempengaruhi mobilitas atau (re)alokasi faktor produksi antar provinsi. Jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah yang tercapai dan semua daerah akan lebih baik.

- Perbedaan sumber daya alam antar provinsi

Pembangunan ekonomi didaerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam.

- Perbedaan kondisi demografis antar wilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar provinsi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

- Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidak lancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar provinsi meliputi barang jasi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produkis dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi.

Salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja perekonomian wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam setiap kebijakan ekonomi yang direncanakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai dengan pemerataan pembangunan, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, wilayah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik yang dimiliki setiap wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat di wilayah dalam pembangunan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang nantinya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong aktivitas ekonomi, karena permintaan yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2008) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara adalah :

Akumulasi modal (*capital accumulation*), meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada pabrik baru, tanah, peralatan fisik dan pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitasnya, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output atau pendapatan pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan penduduk (*growth in population*) maksudnya adalah dengan pertumbuhan penduduk diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti dengan penambahan penduduk akan menambah jumlah produktivitas. Pertumbuhan

penduduk yang lebih besar akan menyebabkan pertumbuhan pasar domestik akan lebih besar, namun positif atau negatifnya pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian tersebut untuk menyerap setiap tambahan angkatan kerja.

Kemajuan teknologi (*technological progress*) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting, karena dengan kemajuan teknologi akan ditemukan cara baru ataupun teknologi baru untuk menggantikan cara-cara lama sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, inflasi yang dikarenakan pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, *capital intensive* sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibanding persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor yang berakibat pada peningkatan harga barang hasil industri, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dengan negara maju, dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain (Arsyad, 2004).

Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris (1973) dalam Arsyad (2004) antara lain:

Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita;

- Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang;
- Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah;
- Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan modal dan harta

tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;

- Rendahnya mobilitas sosial;
- Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
- Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang;
- Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

## 2.7 Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar dalam penelitian ini berdasarkan dari Modul Terapan Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007. Kondisi fisik dasar terdiri dari topografi, morfologi, geologi, hidrologi dan klimatologis. Berikut dijelaskan satu persatu sub variabel fisik dasar:

- **Kondisi Topografi**

Topografi adalah kajian atau penguraian yg terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah yang menunjukkan tempat-tempat di muka bumi dengan ketinggian yang sama. Data topografi banyak ditunjukkan oleh titik tinggi yang dapat ditarik garis lurus sesuai ketinggian tempat tersebut. Garis yang sesuai dengan tingkat ketinggian disebut garis kontur.

Dalam suatu wilayah kelerengan merupakan salah satu bentuk kenampakan alam sesuai tingkat kemiringan lahan. Letak suatu tempat sangat ditentukan dengan kondisi kelerengan. Data kelerengan merupakan data turunan dari topografi. Terdapat berbagai macam pembagian kelas lereng. Pada umumnya, pembagian kelas lereng ini disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Pada analisis aspek fisik wilayah, kelas lereng yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Lereng 0 % - 2%

- 2) Lereng 2% - 5%
- 3) Lereng 5% - 15%
- 4) Lereng 15% - 40%
- 5) Lereng > 40%

Kategori kelas lereng yang diinginkan ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dituangkan dalam bentuk spasial dari data yang ada pada peta topografi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persen kemiringan yang diinginkan} = \frac{\text{Interval Kontur}}{\text{Jarak sesungguhnya yang ingin diketahui}} \times 100$$

Keterangan:

- Interval kontur adalah jarak antar garis kontur yang ada dalam peta topografi
- Persen kemiringan yang diinginkan adalah batas-batas kategori kelas lereng yang akan dihitung, misalnya 2 (%), 5 (%), 15 (%), dan seterusnya.
- Jarak sesungguhnya yang ingin diketahui adalah jarak antar garis kontur yang ingin diketahui kemiringan lerengnya. Jarak yang didapat ini adalah jarak sesungguhnya yang ada di lapangan, sehingga bila akan dihitung dalam peta harus dikonversikan kembali dengan skala peta yang bersangkutan.
- **Kondisi Morfologi**

Kondisi morfologi terdiri dari tiga jenis yaitu datar, perbukitan dan daerah gunung.

Gunung/Gunung Berapi: Satuan tubuh gunung/gunung berapi ini hampir sama dengan satuan morfologi perbukitan, dan umumnya merupakan sub satuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung/gunung berapi. Satuan tubuh gunung/gunung berapi ini perlu dipisahkan dari satuan perbukitan, karena tubuh gunung/gunung berapi mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dari perbukitan umumnya, seperti banyak dijumpai mata air, kandungan gas beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung/gunung berapi.

Bukit/Perbukitan: Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, serta membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci, satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga sub satuan, yakni :

- Sub satuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus;

- Sub satuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% - 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan
- Sub satuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

Datar/Dataran: Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan kisaran kelas lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua sub satuan, yakni:

- Sub satuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan
- Sub satuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kelas lereng lebih dari 2% hingga 5%.

- **Kondisi Geologi**

Geologi adalah ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Data geologi menggambarkan kondisi wilayah berdasarkan faktor litologi atau jenis batuan induk pembentuknya. Data geologi umum diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik secara umum, terutama pada batuan dasar yang akan menjadi tumpuan dan sumber daya alam wilayah ini, serta beberapa kemungkinan bencana yang bisa timbul akibat kondisi geologinya atau lebih dikenal dengan bencana alam beraspek geologi. Data geologi ini mencakup stratigrafi uraian litologinya, struktur geologi, serta penampang-penampang geologi.

- **Kondisi Tanah**

Kondisi tanah terdiri dari kedalaman efektif dan jenis tanah seperti jenis aluvial. Data jenis tanah sangat berguna untuk menentukan jenis komoditas apa yang akan ditanam disesuaikan dengan jenis tanah. Terkadang komoditas tertentu hanya bisa ditanam di jenis tanah tertentu pula. Sedangkan data kedalaman efektif sangat berguna untuk melihat tingkat kesuburan tanah. Semakin tinggi kedalaman efektif maka semakin subur pula wilayah tersebut.

- **Kondisi Klimatologis**

Klimatologi adalah ilmu tentang sebab terjadinya, ciri, dan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan di berbagai negeri yang berbeda. Data kondisi klimatologis digambarkan pada data curah hujan di wilayah studi yang disetiap daerah memiliki perbedaan tingkat curah hujan tersebut.

- **Kondisi Hidrologi**

Hidrologi adalah ilmu tentang air yang ada di dalam tanah atau pun di muka bumi, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, sifat kimia dan fisiknya, serta reaksinya dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Data hidrologi merupakan data yang terkait dengan tata air yang ada, baik di permukaan maupun di dalam tanah/bumi. Tata air yang berada di permukaan tanah dapat berbentuk badan-badan air terbuka seperti sungai, kanal, danau/situ, mata air, dan laut. Sedangkan tata air yang berada di dalam tanah (*geohidrologi*) dapat berbentuk aliran air tanah atau pun sungai awah tanah. Data umum hidrologi yang biasa tersedia adalah peta lokasi badan air (sungai, danau, laut) yang dapat dilihat dari peta rupabumi.

## 2.8 Kondisi Fisik Binaan

Kondisi fisik binaan terdiri dari kawasan budidaya, sarana dan prasarana baik kesehatan, perdagangan jasa dan pendidikan.

- **Prasarana dan sarana**

Prasarana dan sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya. Sumber daya buatan adalah prasarana dan sarana yang mendukung kawasan budidaya, lindung atau kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Prasarana adalah: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah/fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana adalah kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, bangunan industri, dan sebagainya.

Sarana pendidikan memiliki batasan teknis standar sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tatacara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

**Tabel 2.1 Standar Sarana Pendidikan sesuai SNI 03-1733-2004**

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Radius Pencapaian (meter)
1	TK	1.250	500
2	SD	1.600	1.000
3	SLTP	4.800	1.000
4	SLTA	4.800	3.000
5	Taman Bacaan	2.500	1.000

Sumber: SNI 03-1733-2004

Sarana kesehatan memiliki batasan teknis standar sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tatacara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

**Tabel 2.2 Standar Sarana Kesehatan sesuai SNI 03-1733-2004**

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Radius Pencapaian (meter)
1	Posyandu	1.250	500
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000
3	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	4.000
4	Puskemas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500
5	Puskemas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500
7	Apotik/ Rumah Obat	30.000	1.500

Sumber: SNI 03-1733-2004

Sarana perdagangan dan niaga memiliki batasan teknis standar sesuai SNI 03-1733-2004 tentang Tatacara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

**Tabel 2.3 Standar Sarana Perdagangan sesuai SNI 03-1733-2004**

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Radius Pencapaian (meter)
1	Toko/ Warung	250	300
2	Pertokoan	1.200	2.000
3	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	-
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga ( toko + pasar + bank+ kantor)	120.000	-

Sumber: SNI 03-1733-2004

- **Kawasan Budidaya**

Kawasan Budi Daya berdasarkan Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 22).

Kawasan Budi Daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

1. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis.

2. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan.

3. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

4. Kawasan Peternakan

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, serta sebagai padang penggembalaan ternak

5. Kawasan Perikanan Darat

Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya.

6. Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut

Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budi daya maupun penangkapan.

#### 7. Kawasan Perindustrian

Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.

#### 8. Kawasan Pariwisata

Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata

#### 9. Kawasan Permukiman

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

#### 10. Kawasan perdagangan dan jasa

Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa

#### 11. Kawasan pemerintahan

Kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan.

### 2.9 Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan terdiri dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia produktif, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan. Sumber daya manusia adalah masyarakat yang berada di kawasan perencanaan yang diharapkan dapat mandiri dan berdaya, serta mampu memenuhi kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Penduduk usia <15 tahun dan >65 tahun dianggap penduduk tidak produktif. Semakin besar kelompok usia tidak produktif semakin tinggi beban tanggungan penduduk produktif.

### 2.10 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi terdiri dari PDRB dan keunggulan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Keunggulan komoditas ini akan dihitung menggunakan analisis LQ. Hasil analisis LQ akan menunjukkan nilai sektor atau komoditas unggulan. Semakin banyak komoditas unggulan disuatu kecamatan maka semakin maju wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah/daerah.

- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. PDRB dinilai sebagai tolak ukur pembangunan yang paling operasional dalam skala negara di dunia (Rustiadi,2009) PDRB pada dasarnya merupakan total produksi kotor dari suatu wilayah, yakni total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu Negara atau wilayah dalam periode satu tahun. Dengan demikian PDRB mempunyai arti nilai tambah dari aktivitas produktif manusia.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi umumnya didasarkan atas dasar pertumbuhan PDRB untuk melihat perubahan (kenaikan/penurunan) ekonomi di suatu wilayah. Terdapat dua jenis PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku, dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan dan analisa data, Badan Pusat Statistik (BPS) secara langsung maupun tidak langsung menetapkan keseragaman konsep, definisi dan metode yang dipakai di seluruh Indonesia bahwa : PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas asar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Terdapat 9 (sembilan) sektor pembentuk PDRB yang dikenal di Indonesia, yaitu :

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri
- d. Listrik, Gas dan Air
- e. Bangunan dan Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran

- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-Jasa

- **Sektor Komoditas Potensial**

Sektor/ Komoditas Potensial adalah sektor/ kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu mengerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, dan dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah/kawasan. Sektor/ Komoditas Unggulan adalah sektor perekonomian yang mempunyai nilai sangat dominan serta mempunyai keunggulan dalam kontribusi produksi, baik sektoral maupun total, daya persebaran dan derajat yang kuat, serta mempunyai basis ekonomi yang kuat.

### 2.11 Analisis Kesenjangan Wilayah

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teknik-teknik analisis yang digunakan dalam mengukur tingkat (besar) kesenjangan wilayah dan pola kesenjangan wilayah dalam penelitian ini.

#### 2.11.1 Analisis Tingkat Ketimpangan dengan Metode Indeks Williamson

CV Williamson (Coefficient of Variation Williamson) atau yang biasa disebut dengan Indeks Williamson, merupakan alat matematis yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya kesenjangan antar wilayah dan sudah sangat sering diaplikasikan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi antar wilayah khususnya untuk indikator kesenjangan PDRB per Kapita.

Formula ini pada dasarnya sama dengan coefficient of variation (CV) biasa dimana standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Williamson memperkenalkan CV ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk, yang disebut CV<sub>w</sub> (Tadjoeddin, 2001). Formula Indeks Williamson untuk menghitung kesenjangan PDRB per Kapita adalah sebagai berikut (Tambunan, 2001: 271):

$$CV_w = \frac{\sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i}{n}}}{\bar{y}}, 0 < CV_w < 1$$

Keterangan :

- $CV_w$  = Indeks Williamson  
 $f_i$  = penduduk dari bagian wilayah  
 $n$  = penduduk seluruh wilayah  
 $y_i$  = pendapatan PDRB per kapita dari bagian wilayah  
 $\bar{y}$  = pendapatan PDRB per kapita dari wilayah

Nilai indeks ini berskala antara 0 dengan 1. Bila nilainya mendekati 0 ( $0 < CV_w < 0,5$ ), berarti distribusi PDRB menurut wilayah sangat merata, dan sebaliknya jika mendekati 1 ( $0,5 < CV_w < 1$ ) berarti tingkat disparitas sangat tinggi. Indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah dan Negara, tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak melakukan pengukuran PDRB (Rustiadi, 2009).

### 2.11.2 Analisa Skoring

Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, untuk menganalisa potensi fasilitas pelayanan atau hirarki tiap kecamatan yang merupakan bagian dari sistem wilayah digunakan analisa skoring. Hirarki menurut Smailes (1965) dalam Prasetyo (2008) dirumuskan beberapa kegiatan tertentu yang merupakan atribut yang harus dimiliki agar suatu wilayah dapat berfungsi penuh. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : bank, pasar, sekolah-sekolah lanjutan, rumah sakit, tempat hiburan, surat kabar. Sedangkan penduduk sebagai pihak yang menggunakan fasilitas pelayanan perlu diperhitungkan sehingga perhitungan yang dilakukan adalah rasio sarana terhadap jumlah penduduk. Christaller (1933) dalam Rustiadi (2009) menyatakan suatu infrastruktur dari suatu kegiatan dalam bentuk apapun tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang dimana sarana dan prasarana penunjang tidak menyebar secara merata di dalam suatu sistem ruang, tetapi penyebarannya tergantung pada permintaan, sedangkan permintaan sangat tergantung pada konsentrasi penduduk. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya hirarki pusat pelayanan, selain itu dinyatakan pula bahwa kisaran spasial dari proses permintaan dan penawaran beragam bergantung ordernya sehingga bentuk dan struktur lokasi pusat secara keseluruhan bergantung

pada keragaman sistematis dari tinggi rendahnya kisaran spasial dari proses pertukaran atau permintaan dan penawaran, oleh karena itu fasilitas pelayanan yang lebih kompleks akan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas pelayanan yang lebih sederhana.

- **Metode Indeks**

Metode ini digunakan untuk menganalisis data kesenjangan dalam menilai tingkat kemajuan suatu wilayah di setiap kecamatan di kabupaten Blitar. Langkah-langkah menghitung yaitu :

- a. Menentukan variabel –variabel yang akan digunakan sebagai indikator.
- b. Menghitung indeks setiap variabel. Berikut rumus perhitungan indeks

$$i = \frac{x}{y} \times 100$$

Keterangan :

$i$  = indeks skoring

$y$  = nilai hitung

$x$  = nilai tertinggi

- c. Menghitung indeks kumulatif
- d. Membuat matriks tingkat kemajuan wilayah dan dibandingkan masing-masing kecamatan.

## 2.12 Analisis Potensi Wilayah Location Quotient (LQ)

*Location Quotient* (LQ) adalah suatu teknik analisis yang merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Cara ini belum dapat memberikan kesimpulan akhir dan masih berupa kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan ditilik kembali melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara diatas terbukti kebenarannya. Walaupun teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir, namun dalam tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan: hasil produksi, atau satuan lain yang dapat digunakan

sebagai kriteria. (Suwardjoko Warpani, 1980:68). Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan:

- $S_i$  = Hasil produksi i di daerah yang diselidiki
- $S$  = Hasil produksi seluruhnya di daerah yang diselidiki
- $N_i$  = Hasil produksi i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.
- $N$  = Hasil produksi di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.

Teknik LQ adalah suatu teknik perhitungan basis ekonomi pada masing-masing industri individual di daerah yang bersangkutan (dan daerah yang lebih luas sebagai keseluruhan norma referensi), dan dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan ekspor. Dengan kata lain, spesialisasi lokal suatu daerah dalam produksi suatu barang tertentu mempunyai makna ekspor lokal dari produksi surplus. Cara ini dilakukan dengan cara menghitung nilai LQ untuk setiap sektor. (Paul Sitohang dalam Harry W. Richardson, 1991: 16) Location Quotient (LQ) ini biasanya digunakan untuk menghitung basis ekonomi suatu daerah, namun dalam penerapannya dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung kemampuan penyediaan komoditi pada suatu daerah. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien menggunakan satuan hasil produksi.

- Jika:  $LQ > 1$ , maka komoditi itu layak untuk diekspor ke daerah lain
- $LQ < 1$ , maka komoditi itu diimpor dari daerah lain
- $LQ = 1$ , maka hasil komoditi dikonsumsi untuk daerah itu sendiri.

### 2.13 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Penyusunan AHP harus memperhatikan tiga prinsip dasar proses hierarki analitik yang perlu diketahui yaitu: (Thomas L. Saaty dalam Safirin)

- a. Menggambarkan dan menguraikan secara hierarkis. Hierarkis yaitu memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah-pisah.
- b. Penetapan prioritas. Penetapan prioritas adalah menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. Langkah pertama dalam

menetapkan prioritas elemen-elemen dalam persoalan keputusan adalah dengan membuat matrik perbandingan (*pairwise comparison*) yaitu elemen-elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan untuk perbandingan berpasangan ini, matrik secara unik mencerminkan dari segi prioritas, mendominasi, dan didominasi.

**Tabel 2.4 Matrik Perbandingan Berpasangan**

C	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>
A <sub>1</sub>	A <sub>11</sub>	A <sub>12</sub>	A <sub>13</sub>
A <sub>2</sub>	A <sub>21</sub>	A <sub>22</sub>	A <sub>23</sub>
A <sub>3</sub>	A <sub>31</sub>	A <sub>32</sub>	A <sub>33</sub>

Elemen di A<sub>1</sub> pada kolom kiri dengan elemen A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> yang terdapat pada baris paling atas dibandingkan berkenaan dengan disfat C di sudut kiri atas. Nilai a<sub>ij</sub> adalah nilai perbandingan elemen A<sub>i</sub> terhadap elemen A<sub>j</sub> yang menyatakan hubungan:

- 1) Seberapa jauh tingkat kepentingan A<sub>i</sub> bila dibandingkan dengan A<sub>j</sub>, atau
- 2) Seberapa banyak kontribusi A<sub>i</sub> terhadap kriteria C dibandingkan A<sub>j</sub>, atau
- 3) Seberapa jauh dominasi A<sub>i</sub> bila dibandingkan dengan A<sub>j</sub>, atau
- 4) Seberapa banyak sifat kriteria C terhadap A<sub>i</sub> dibandingkan dengan A<sub>j</sub>.

**Tabel 2.5 Skala Perbandingan Menurut Saaty**

Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Penilaian lebih sedikit memihak pada salah satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Penilaian lebih memihak pada salah satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat penting	Salah satu elemen sangat berpengaruh dan dominasinya tampak
9	Mutlak lebih penting	Salah satu elemen lebih penting daripada pasangannya pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah diantara judgment di atas	Terdapat keraguan diantara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/a_{ji}$ (jika aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding i	

Bobot yang dicari dinyatakan dalam vektor  $w = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$ . Nilai  $w_n$  menyatakan bobot relatif kriteria  $A_n$  terhadap keseluruhan kriteria. Nilai perbandingan yang didapatkan dinyatakan dalam vektor  $W$  sebagai:

$$A_{ij} = w_i/w_j$$

Dari persamaan di atas nantinya dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$A \cdot W = n \cdot W$$

Dimana dalam teori matriks, formula tersebut menyatakan bahwa  $W$  adalah Eugene vektor dari matrik  $A$  dengan Eugene value  $n$ . Bila matrik ditulis secara lengkap maka persamaan tersebut akan terlihat sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \frac{W_1}{W_1} & \frac{W_1}{W_2} & \dots & \frac{W_1}{W_n} \\ \frac{W_2}{W_1} & \frac{W_2}{W_2} & \dots & \frac{W_2}{W_n} \\ \frac{W_3}{W_1} & \frac{W_3}{W_2} & \dots & \frac{W_3}{W_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{W_n}{W_1} & \frac{W_n}{W_2} & \dots & \frac{W_n}{W_n} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}$$

Variabel di atas dapat diganti dengan sebuah vektor  $\alpha$  sebagai berikut:

$$A \cdot W = \alpha \cdot W$$

Dimana:  $A$  merupakan matrik  $n \times n$ ,  $W$  adalah eugene vektor, dan  $\alpha$  adalah eugene value  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ .

- c. Konsistensi logis yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan dikelompokkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Konsistensi adalah jenis pengukuran yang tidak dapat terjadi begitu saja atau mempunyai syarat tertentu. Dengan nilai Eugene value yang maksimum ( $\alpha$  maks) dapat dihitung indeks konsistensi (*consistency index/CI*) yaitu dengan rumus:

$$CI = (\alpha \text{ maks} - n)/(n-1)$$

Dimana:  $\alpha$  merupakan nilai eugene value dan  $n$  adalah ukuran matriks. Selanjutnya indeks konsistensi tersebut diubah dalam bentuk rasio konsistensi (*consistency ratio/CR*) dengan cara membaginya dengan suatu indeks random (*random index/IR*) yang harganya telah ditetapkan.

#### 2.14 Analisis Indeks Sentralitas

Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/ masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110).

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/ hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003:118). Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.

Analisis indeks sentralitas Marshall menurut Sumaatmaja, 1988 digunakan dengan memberikan bobot pada fasilitas yang ada dan dengan analisis ini dapat ditentukan hierarki dari masing-masing kota. Untuk menentukan nilai sentralitas atau bobot dapat dihitung dari persamaan berikut: Jumlah Kelas =  $1 + 3,3 \log n$

$$C = \frac{t}{T}$$

C : Bobot dari atribut suatu fasilitas

t : Nilai sentralitas gabungan

T : Jumlah total atribut fasilitas

Setelah mengetahui nilai sentralitas, kita dapat menentukan indeks sentralitas dengan mengalikannya dengan jumlah fasilitas yang ada. Berdasarkan *range (interval)* inilah yang kemudian dapat ditentukan hierarki (tingkatan) dari masing-masing kota.

## 2.15 Studi Terdahulu

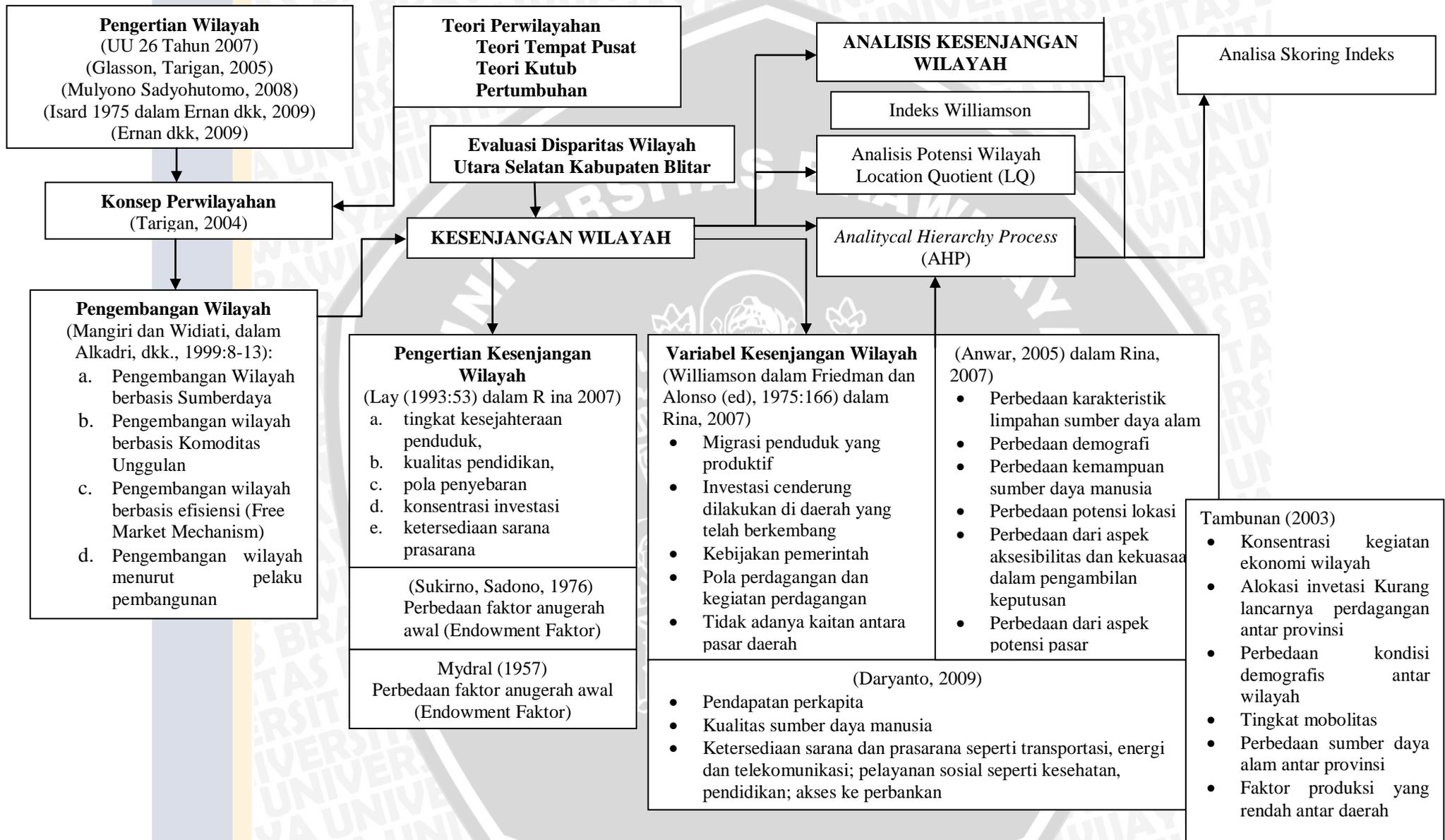
No.	Judul	Tujuan	Variabel	Unit Analisis	Metode	Hasil	Pertimbangan bagi Peneliti
1.	Analisis kesenjangan wilayah di Gerbangkertosusila ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Fitri Ami Handayani, 2006)	Mengetahui tingkat Perkembangan wilayah berdasar kesenjangan wilayah ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan	❖Ekonomi ❖Sosial ❖Lingkungan	Kabupaten/Kota	Analisis kesenjangan wilayah dengan metode Indeks Williamson, dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS)	Kesenjangan wilayah di Gerbangkertosusila ternyata lebih signifikan dalam indikator-indikator ekonomi dan lingkungan daripada indikator-indikator sosial. Pola kesenjangan ekonomi dan pola kesenjangan sosial menunjukkan hubungan yang searah. Jadi, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk kesenjangan lingkungan memiliki pola yang berlawanan.	Beberapa variabel penelitian seperti ekonomi diambil sebagai variabel dalam penelitian. Metode (Indeks Williamson) yang dipakai dalam studi ini diambil sebagai acuan dasar dalam penelitian.
2.	Disparitas Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar). Rina Rezeki, 2007.	Mengkaji dan menemukan konsep disparitas antar sub wilayah melalui Kabupaten Tanah Datar	❖Kebijakan Pemerintah, ❖Ketersediaan sarana prasarana, ❖Kondisi Perekonomian, ❖Sosial Kependudukan	Kecamatan	Analisis deskriptif, Analisis LQ, Analisis Klaassen/ Tipologi daerah	Terjadi disparitas sub antar wilayah, dengan tipologi klaassen menurut pertumbuhan dan pendapatan kecamatan maka erklasifikasi wilayah maju dan tidak maju, faktor pengaruh disparitas di Kab tanah Datar yang potensi SDA yang dimiliki.	Beberapa metode analisis seperti analisis deskriptif, analisis LQ serta variabel kebijakan, ketersediaan sarana prasarana, perekonomian, kependudukan dapat dipakai sebagai variabel acuan penelitian.
3.	Analisis	Menghitung tingkat	❖Ketimpangan	Kabupaten dan	Analisis Deskriptif,	Menggunakan pendekatan	Metode analisis deskriptif

Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-2008 (Yuki Angelia, 2010)	ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Membuktikan hipotesis “U Terbalik” Kuznets berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.	Pembangunan Wilayah ❖PDRB Per kapita ❖Investasi ❖Aglomerasi	Kota	Analisis Regresi	PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 1995-2008 masih tinggi. Sedangkan Hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB per kapita dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan sehingga disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu PDRB per kapita, investasi, aglomerasi, dan dummy desentralisasi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah.	digunakan sebagai metode acuan penelitian. Sedangkan variabel menggunakan PDRB perkapita.
4. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Di	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menganalisis pengaruh kesenjangan terhadap	❖Pertumbuhan Ekonomi (perubahan tahun menurut harga Kesenjangan Ekonomi Antar	Kabupaten dan Kota	Indeks Williamson Analisis regresi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat ekonomi antar daerah	Metode analisis deskriptif dan indeks williamson digunakan sebagai metode acuan penelitian. Sedangkan variabel menggunakan PDRB perkapita.

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal (Hadi Sasana, 2009)	kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	di Daerah ❖Tenaga Kerja Terserap Kesejahteraan masyarakat (indeks ❖Pembangunan manusia di kabupaten/kota)	berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat
--	--	--	--

Sumber: Hasil Rangkuman Studi Terdahulu, 2011





Gambar 2.3 Kerangka Teori

<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Definisi Operasional .....</b>	<b>13</b>
2.1.1 <i>Pengertian Wilayah</i> .....	13
2.1.2 <i>Pengertian Kesenjangan</i> .....	14
<b>2.2 Konsep Perwilayahan .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Pengembangan Wilayah .....</b>	<b>17</b>
<b>2.4 Teori Perwilayahan .....</b>	<b>18</b>
2.4.1 <i>Teori Tempat Pusat</i> .....	18
<b>Gambar 2.1 Luas jangkauan range dan tresehold</b> .....	<b>19</b>
<b>Gambar 2.2 Kronologi terjadinya area perdagangan heksagonal</b> .....	<b>20</b>
<b>2.5 Teori Kutub Pertumbuhan .....</b>	<b>21</b>
2.5.1 <i>Kesenjangan sebagai Bagian Dari Pengembangan Wilayah</i> .....	24
<b>2.6 Variabel dan Faktor Penyebab Kesenjangan Wilayah .....</b>	<b>25</b>
<b>2.7 Kondisi Fisik Dasar .....</b>	<b>33</b>
<b>2.8 Kondisi Fisik Binaan .....</b>	<b>36</b>
Tabel 2.1 Standar Sarana Pendidikan sesuai SNI 03-1733-2004 .....	37
Tabel 2.2 Standar Sarana Kesehatan sesuai SNI 03-1733-2004 .....	37
Tabel 2.3 Standar Sarana Perdagangan sesuai SNI 03-1733-2004 .....	37
<b>2.9 Kondisi Kependudukan.....</b>	<b>39</b>
<b>2.10 Kondisi Ekonomi .....</b>	<b>39</b>
<b>2.11 Analisis Kesenjangan Wilayah .....</b>	<b>41</b>
2.11.1 <i>Analisis Tingkat Ketimpangan dengan Metode Indeks Williamson</i> .....	41
2.11.2 <i>Analisa Skoring</i> .....	42
<b>2.12 Analisis Potensi Wilayah Location Quotient (LQ).....</b>	<b>43</b>
<b>2.13 Analytical Hierarchy Process (AHP) .....</b>	<b>44</b>
Tabel 2.4 Matrik Perbandingan Berpasangan .....	45
Tabel 2.5 Skala Perbandingan Menurut Saaty.....	45
<b>2.14 Analisis Indeks Sentralitas .....</b>	<b>47</b>
<b>2.15 Studi Terdahulu .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 2.3 Kerangka Teori</b> .....	<b>51</b>